

**PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN,
KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, DAN BUDAYA
ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

(Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh :
Ella Rosilawaty
NPM. 15.0102.0222

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2019**

**PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN,
KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, DAN BUDAYA
ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**
(Studi Empiris pada OPD Kabupaten Purworejo)

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang**



Disusun Oleh :

Ella Rosilawaty

NIM. 15.0102.0222

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2019**

SKRIPSI

PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

(Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

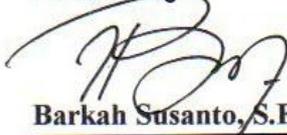
Ella Rosilawaty

NPM 15.0102.0222

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal **16 Agustus 2019**.....

Susunan Tim Penguji

Pembimbing

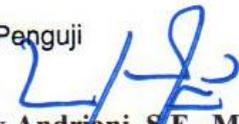


Barkah Susanto, S.E., M.Sc., Ak.

Pembimbing I

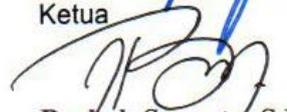
Pembimbing II

Tim Penguji



Lilik Andriani, S.E., M.Si.

Ketua



Barkah Susanto, S.E., M.Sc., Ak.

Sekretaris



Veni Soraya Dewi, S.E., M.Si.

Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal, **07 SEP 2019**.....



Dra. Marlina Kurnia, MM

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ella Rosilawaty

NIM : 15.0102.0222

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul :

**PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN,
KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, DAN BUDAYA
ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**
(Studi Empiris pada OPD Kabupaten Purworejo)

Adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan saya ini buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 1 Agustus 2019

Pembuat pernyataan



Ella Rosilawaty

NIM. 15.0102.0222

RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Ella Rosilawaty
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Purworejo, 15 Juli 1996
Agama : Islam
Alamat : Lugosobo, Gebang, Purworejo
E-mail : rosilawatyella@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

2002 – 2008 : SDN 1 Gintungan
2008 – 2011 : MTsN Purworejo
2011 – 2014 : MAN Purworejo
2015 – 2019 : SI Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang

Pengalaman Kerja

1. PT. Bina Artha Ventura

Periode : Oktober 2014 – Oktober 2017
Status : Pegawai Tetap
Posisi : Relationship Officer

Magelang, 1 Agustus 2019

Peneliti



Ella Rosilawaty

NIM. 15.0102.0222

MOTTO

“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.” (Aristoteles)

“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah.” (Lessing)

“orang-orang hebat dibidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menyalakan waktu untuk menunggu inspirasi.” (Ernest Newman)

“Orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukai atau tidak.” (Aldus Huxley)

“Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang kita miliki, tetapi kita selalu menyesali apa yang belum kita capai.” (Schopenhauer)

“Musuh yang paling berbahaya diatas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.” (Andrew Jackson)

“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali Nampak mustahil; kita baru yakin kalau kita telah berhasil melalkukannya dengan baik.” (Evelyn Underhill)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul **PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWOREJO** (Studi Empiris pada OPD Kabupaten Purworejo)".

Berkat arahan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini dengan baik. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Nur Laila Yuliani, SE, M.Sc selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bpk Barkah Susanto, SE., M.Sc selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan ilmu yang berharga.
4. Keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan untuk kelancaran penyusunan skripsi ini.
5. Teman-teman yang selalu mendukung dan membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan dan motivasinya.

Magelang, 1 Agustus 2019

Peneliti



Ella Rosilawaty

NIM. 15.0102.0222

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
RIWAYAT HIDUP.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS	10
A. Landasan Teori.....	10
B. Penelitian Terdahulu	17
C. Perumusan Hipotesis.....	19
D. Model Penelitian	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling.....	25
B. Definisi Operasional dan Pengukurannya.....	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Sampel Penelitian.....	33
B. Statistik Deskriptif	34

C. Uji Kualitas Data.....	37
D. Regresi Linier Berganda	39
E. Uji Hipotesis	40
F. Pembahasan.....	44
BAB V KESIMPULAN	48
A. Kesimpulan	48
B. Keterbatasan.....	49
C. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Capaian Kinerja Tahun 2017.....	1
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	17
Tabel 2.2	PenelitianTerdahulu (Lanjutan).....	18
Tabel 4.1	Sampel Penelitian dan Tingkat Pengembalian	34
Tabel 4.2	Profil Responden	34
Tabel 4.3	Statistik Deskriptif.....	36
Tabel 4.4	Tabel <i>Cross Loading</i>	38
Tabel 4.5	Pengujian Reliabilitas.....	39
Tabel 4.6	Koefisien Regresi	39
Tabel 4.7	Uji R^2	40
Tabel 4.8	Uji F.....	41
Tabel 4.9	Uji t.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar1.1 Model Penelitian	24
Gambar 3.1 Penerimaan Uji t	30
Gambar 3.2 Penerimaan Uji F	31
Gambar 4.1 Penerimaan Uji F	41
Gambar 4.2 Penerimaan Hipotesis Kejelasan Sasaran Anggaran	43
Gambar 4.3 Penerimaan Hipotesis Budaya Organisasi	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian	55
Lampiran 2 KUESIONER PENELITIAN	56
Lampiran 3 Tabulasi Data Mentah.....	63
Lampiran 4 Profil Responden	72
Lampiran 5 Analisis Statistik Deskriptif.....	75
Lampiran 6 Uji Validitas.....	76
Lampiran 7 Uji Reliabilitas.....	81
Lampiran 8 Uji Regresi Linier Berganda.....	82

ABSTRAK

PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWOREJO (Studi Empiris pada OPD Kabupaten Purworejo)

Oleh:

Ella Rosilawaty

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan budaya organisasi terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Purworejo. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Populasi dalam penelitian ini 20 OPD di Kabupaten Purworejo dengan jumlah responden sebanyak 140. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu dengan memilih responden yang memenuhi kriteria yang akan diteliti. Metode Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah (Ha1 diterima). Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah (Ha2 tidak diterima). Dan budaya organisasi juga tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah (Ha3 tidak diterima).

Kata Kunci: *Partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, budaya organisasi dan kinerja pemerintah daerah.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kinerja instansi pemerintah kini lebih mejadi sorotan publik, mengenai pelayanan instansi pemerintah untuk masyarakat. Maka dari itu dalam otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk dapat mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri. Bertujuan agar lebih mendekatan pelayanan pemerintah daerah dengan masyarakat. Penyelenggaraan Pemerintah daerah yang baik adalah pemerintah yang dituntut untuk dapat lebih transparan, akuntabel, partisipatif, efisien dan adanya kepastian hokum dalam menjalankan administrasi public khususnya mengenai anggaran (LKJiP Kabupaten Purworejo tahun 2016). Keberhasilan pencapaian kinerja dilandasi dan di imbangi dengan penerapan prinsip-prinsip kebijakan seperti akuntabel, efisien, partisipatif, dan kinerja yang baik untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah. Berikut peneliti lampirkan capaian kinerja tahun lalu dalam bentuk tabel.

Tabel 1.1
Capaian Kinerja Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Tahun 2017			Target Akhir	Kategori
			Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Nilai Akuntabilitas kinerja instansi	CC	CC	CC	100%	B	Akan Tercapai
2.	Indeks kepuasan masyarakat	70%	80%	80%	100%	95%	Akan Tercapai
3.	Tingkat maturitas SPIP	1,88	2,18	3,023	100%	3	Tercapai
4.	Opini L/K Auditor eksternal	WTP	WTP	WTP	100%	WTP	Tercapai
5.	Meningkatnya kapasitas manajemen administrasi	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai

Sumber: pemkabpurworejo.go.id

Berdasarkan hasil kinerja tahun 2017 pada tabel diatas dapat dilihat bahwa beberapa indikator kinerja sudah tercapai dengan baik, terlihat opini laporan keuangan oleh auditor beropini WTP. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Instansi Kabupaten Purworejo dapat dikatakan baik di tahun 2017. Walaupun dalam prosesnya masih terdapat beberapa hambatan, namun hambatan tersebut dapat dipecahkan dengan beberapa solusi, antara lain adanya keterbukaan kerja sama dengan pihak ketiga untuk peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan tersedianya beberapa aplikasi generic dari Lembaga Pusat dalam memonitoring dan evaluasi akuntabilitas pemerintahan (LKJiP Tahun 2017).

Berdasarkan sumber resmi Kabupaten Purworejo yaitu Purworejokab.go.id, untuk LKJiP dan LAKIP Kabupaten Purworejo belum resmi di Publikasikan, maka dari itu sebagai bahan pertimbangan penulis menggunakan hasil evaluasi SAKIP tahun 2018 bahwa dalam evaluasi SAKIP tahun 2018 terdapat beberapa masalah yakni,

1. Pertama masih terdapat Perangkat Daerah yang IKU-nya belum mencakup seluruh kinerja yang dihasilkan.
2. Kedua, laporan kinerja tingkat Kabupaten maupun Perangkat Daerah perlu disempurnakan karena belum menyajikan analisis penyebab tidak tercapainya target kinerja secara memadai, sehingga tidak dapat digunakan untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.

3. Ketiga, pencapaian sasaran strategis masih belum sepenuhnya didukung dengan pemilihan program dan kegiatan yang relevan, sehingga masih dijumpai program dan kegiatan yang tidak efektif dan tidak efisien.
4. Keempat, evaluasi atas program yang dilakukan baru sebatas pelaksanaan program penyerapan anggaran, belum kepada hasil program, sehingga masih dijumpai ketidakselarasan antara kegiatan hasil program serta peran serta yang diemban oleh Perangkat Daerah (Metro Times). Suatu organisasi pasti mempunyai tujuan, salah satunya yaitu meningkatkan kinerja manajerial. Suatu tujuan dapat tercapai jika didukung oleh perencanaan yang strategik. Perencanaan strategik sendiri dapat didukung dengan perubahan dan perilaku anggota organisasi serta budaya organisasi yang kuat untuk melaksanakan kegiatan setra program-program yang dijalankan secara efektif dan efisien.

Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukur yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun Mulyadi (2001). Anggaran merupakan alat pengendalian perencanaan yang sangat penting bagi suatu organisasi. Maka dari itu untuk tercapainya tujuan dan keberhasilan sasaran anggaran, suatu organisasi perlu partisipasi anggaran yaitu kerjasama yang baik antara atasan dan bawahan, mereka perlu ikut aktif dan komunikatif dalam proses anggaran sehingga termotivasi untuk mencapai kinerja sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Partisipasi penyusunan anggaran

merupakan anggaran yang disusun dengan kerjasama dan partisipasi penuh dari seluruh manajer pada segala tingkatan Garrison (2013: 385).

Suatu penyusunan atau perencanaan penganggaran harus dinyatakan secara jelas, spesifik, dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya (Primadana dkk2014). Kejelasan sasaran anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perencanaan anggaran. Sasaran anggaran akan mempermudah kinerja para anggota organisasi dalam tanggungjawabnya melaksanakan tugasnya apakah mengalami keberhasilan atau kegagalan dan mencapai tujuan. Sasaran anggaran juga membantu para anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dan mendorong tercapainya tingkat kinerja yang lebih baik. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan dapat menimbulkan kebingungan, tidak tenang dan tidak adanya kepuasan dalam bekerja, sehingga hal ini sangat mempengaruhi kinerja para anggota organisasi yang dapat menimbulkan kinerja yang buruk dan sulit tercapainya tujuan.

Tingkah laku dan perbuatan para anggota organisasi perlu diperhatikan, karena hal ini mempengaruhi anggota organisasi dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya. Budaya organisasi merupakan segala sesuatu yang dilakukan, dipikirkan, dan diciptakan oleh manusia dalam masyarakat atau organisasi, serta termasuk pengakumulasian sejarah dari objek-objek atau perbuatan yang dilakukan sepanjang waktu (Peruci dan Hamby, 2004:148). Budaya organisasi, sesuatu hal yang perlu diperhatikan, karena merupakan salah satu perencanaan strategic yang perlu ditingkatkan lagi.

Melihat kegiatan-kegiatan yang bersifat rutinitas yang memicu anggota organisasi kurang focus dalam bekerja. Maka dari itu budaya organisasi perlu ditingkatkan untuk memberikan rasa tanggungjawab terhadap tugas yang diberikan, mempermudah dan meningkatkan komitmen dalam bekerja dan mekanisme pengendali yang membentuk sikap dan perilaku para anggota organisasi demi tercapainya tujuan dan kinerja yang lebih baik.

Penelitian ini menguji bagaimana pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah karena beberapa peneliti terdahulu memberikan hasil yang berbeda. Hasil penelitian {Primadana *et. al*, (2014); Matondangdkk, (2015); Denny, (2015)} menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD. Berbeda dengan hasil penelitian Vonny (2014) yang menunjukkan hasil secara parsial bahwa partisipasi penyusunan anggaran terdapat pengaruh positif terhadap kinerja manajerial SKPD sedangkan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial SKPD. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2016) menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dkk (2016), Wirnipin dkk (2015) mengenai pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pemerintah daerah menunjukkan hasil bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Berbeda dengan

penelitian Aisyah dkk (2014) yang memberikan hasil bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian riset penelitian terdahulu masih terdapat penelitian yang berbeda.

Penelitian ini dibuat dengan menggunakan acuan Zein (2016) yang meneliti tentang Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Siak (SKPD Kabupaten Siak). Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif antara partisipasi penyusunan anggaran, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD. Penelitian yang sama akan digunakan dengan menambahkan satu variabel baru yaitu budaya organisasi. Alasan dipilihnya variable tersebut karena melihat kinerja anggota organisasi sebagian besar masih kurang optimal, mereka membutuhkan budaya organisasi yang kuat untuk mendukung perencanaan strategik yang mendorong kinerja anggota organisasi yang lebih baik, lebih inovasi dan lebih fokus dan tercapainya keberhasilan tujuan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah?
2. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah?
3. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah
2. Untuk mengetahui pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
3. Untuk mengetahui Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan dan menguji kemampuan mahasiswa mengenai berapa besar pengaruh rasio keuangan dan seberapa signifikan pengaruh yang diukur dengan variabel-variabel dari teknik fundamental terhadap harga saham perusahaan manufaktur.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menerapkan teori yang telah diperoleh di perkuliahan dan menambah wawasan penulis dengan memberikan pengetahuan tentang pengaruh kinerja rasio keuangan terhadap harga saham perusahaan manufaktur.

b. Bagi Perusahaan

Memberikan masukan kepada perusahaan untuk lebih tepat dan teliti dalam mencari suatu informasi keuangan untuk mengetahui bagaimana kinerja suatu perusahaan (kinerja keuangan perusahaan).

c. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat menambah referensi untuk perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang, serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang sama.

E. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi landasan teori yang melandasi penelitian, membahas hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis, dan kerangka pemikiran yang

menggambarkan hubungan antar variabel penelitian, serta hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Menguraikan deskripsi dari variabel-variabel penelitian, definisi operasional, penentuan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data penelitian, serta metode analisis data dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasannya.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. *Stewardship Theory*

Stewardship Theory adalah teori yang didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam suatu perusahaan atau organisasi sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principalnya (Donaldson dan Davis 1989,1991). Teori ini menggambarkan dimana para manajer tidak termotivasi oleh oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Fauziah, 2016). Teori ini didasarkan untuk membentuk perilaku anggota organisasi agar selalu dapat diajak kerjasama, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok yang mana hal ini dapat mendorong tercapainya tujuan organisasi.

Akuntansi sektor publik ini pada awal perkembangannya disiapkan guna memberikan informasi dari hubungan *stewards* (pemerintah) dengan principalnya (masyarakat). Implikasi teori steward dalam penelitian ini, yaitu dalam hal pengelolaan anggaran yaitu para pengelola anggaran diharapkan dapat bekerja sesuai tugas dan tanggungjawabnya sebaik mungkin, secara tepat dan efisien untuk kepentingan publik dan instansi mereka, dengan begitu tujuan pengelolaan anggaran dapat tercapai secara maksimal. Steward diharapkan mampu mengarahkan semua kemampuan

dan keahlian sumber daya manusianya dengan memanfaatkan penerapan budaya organisasi yang mendorong para pegawai untuk dapat berkomitmen terutama yang terlibat dalam pengelolaan anggaran, sehingga diharapkan dapat mencapai pengelolaan dan sasaran anggaran yang tepat, jelas dan makin efektif.

2. Kinerja Pemerintah Daerah

Zein (2016) menyebutkan Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Sedangkan definisi pemerintah daerah berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 1 ayat 2 yaitu Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahsun (2006:198) dalam Asrini (2017) mengungkapkan pengukuran kinerja pemerintah daerah diarahkan pada masing-masing satuan kerja yang telah diberi wewenang mengelola sumberdaya sebagaimana bidangnya, setiap satuan kerja adalah pusat pertanggungjawaban yang memiliki keunikan sendiri-sendiri, dengan demikian perumusan indikator kinerja tidak bisa seragam untuk diterapkan pada semua Satuan Kerja yang ada, namun demikian dengan pengukuran kinerja setiap satuan kerja ini

harus tetap dimulai dari pengidentifikasian visi, misi, falsafah, kebijakan, tujuan, sasaran, program, anggaran, serta tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Teori stewardship memandang bahwa manajemen dapat berperilaku baik untuk kepentingan publik dan stakeholder. Teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi dapat dicapai dengan memaksimalkan manajemen. Implikasinya, teori ini dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya masyarakat untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan amanahnya.

3. Partisipasi Penyusunan Anggaran

Brownell (1982) dalam Supriyono (2005) partisipasi penyusunan anggaran adalah suatu proses dalam suatu organisasi yang melibatkan para manajer dalam penentuan tujuan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya. Keikutsertaan para manajer ini menentukan suatu organisasi dalam mengambil keputusan yang lebih realistis untuk menciptakan kesesuaian penentuan anggaran. Partisipasi anggaran pada umumnya menuntut para manajer untuk bekerja sama dalam menyusun dan memutuskan anggaran serta untuk pencapaian sasaran anggaran. Menurut Hansen/Mowen (2013:223) mendefinisikan partisipasi anggaran adalah penganggaran yang memungkinkan para manajer yang akan bertanggungjawab atas kinerja anggaran, untuk partisipasi dalam pengembangan anggaran, partisipasi anggaran mengkomunikasikan rasa

tanggungjawab kepada para manajer tingkat bawah dan mendorong kreativitas.

Partisipasi anggaran merupakan proses dimana bawahan ataupun atasan ataupun pelaksana anggaran diberi kesempatan untuk ikut serta atau terlibat dalam proses penyusunan anggaran dan mempunyai pengaruh dalam proses penyusunan anggaran (Chong,2002). Penyusunan anggaran secara partisipatif diharapkan mampu meningkatkan kinerja karyawan pada tingkat atasan maupun bawahan, sehingga dapat menghasilkan suatu prestasi yang baik. Partisipasi penyusunan anggaran juga dapat digunakan untuk menyelaraskan antara tujuan pusat pertanggungjawaban dengan tujuan organisasi secara menyeluruh. Keikutsertaan para karyawan dalam penyusunan anggaran ini juga dapat mengurangi tekanan dan kebingungan para karyawan, karena mereka mengetahui suatu tujuan yang jelas dan relevan, serta dapat diterima dan dicapai.

Murray (1988) anggaran partisipatif dinilai mempunyai konsekuensi terhadap sikap dan perilaku anggota organisasi, tingkat keterlibatan, pengaruh dan kontribusi bawahan dalam proses penyusunan anggaran merupakan faktor utama yang membedakan antara anggaran partisipatif dengan anggaran non-partisipatif. Partisipasi anggaran menunjukkan pada luasnya partisipasi bagi aparat pemerintah daerah dalam memahami anggaran yang diusulkan oleh unit kerjanya dan pengaruh tujuan pusat pertanggungjawaban anggaran mereka (Poerwati, 2002). Keterlibatan pihak-pihak terkait tidak dapat dihindari lagi, partisipasi bawahan maupun

atas semua ikut berperan dan terlibat dalam penyusunan anggaran, maka akan terlaksananya pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

4. Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Suhartono dan Solichin, 2006). Ginting (2009) menjelaskan adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah, ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja, hal ini menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan (Mbon, 2015). Kejelasan sasaran anggaran menggambarkan seberapa luas sasaran anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik dan dapat dimengerti oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaiannya. Sasaran anggaran yang tidak jelas, dapat menyebabkan tekanan, kebingungan, dan ketidakpuasan karyawan dalam

bekerja, sehingga akan berdampak buruk terhadap kinerja manajerial (Sitepu, 2015).

5. Budaya Organisasi

Menurut Lathans (1998) budaya organisasi diartikan sebagai norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku anggota organisasi. Semua anggota organisasi akan berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku agar diterima oleh lingkungannya. Rivai dan Mulyadi (2012) dalam Wahyuni (2016) budaya organisasi adalah kerangka kerja yang menjadi pedoman tingkah laku sehari-hari dan membuat keputusan untuk anggota organisasi dan mengarahkan tindakan untuk mencapai tujuan organisasi.

Budaya organisasi adalah sistem nilai-nilai yang diyakini oleh semua anggota organisasi dan yang dipelajari, diterapkan serta dikembangkan secara berkesinambungan, berfungsi sebagai sistem perekat dan dapat dijadikan acuan berperilaku dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Wirnipin *et al* 2015). Budaya organisasi penting untuk suatu organisasi, karena budaya organisasi dapat memberikan anggapan yang dimiliki yang diterima secara implisit dan menentukan suatu kelompok dalam organisasi untuk dapat merasakan, memikirkan dan bereaksi terhadap lingkungannya yang beraneka ragam.

Budaya organisasi adalah sesuatu yang dipercayai oleh karyawan dan kepercayaan ini dapat membentuk keyakinan, nilai-nilai dan

ekspektasi (Gibson, 1997). Budaya organisasi penting untuk suatu organisasi sebagai persepsi yang dapat dianut oleh anggota-anggota organisasi sebagai makna atau suatu sistem bersama. Melalui budaya organisasi, kelompok dalam suatu organisasi dapat memiliki interaksi yang lebih baik antara atasan dan bawahan, baik secara langsung ataupun tidak. Proses pembentukan budaya organisasi berhubungan dengan pembentukan kelompok, yakni dalam pembagian pola pemikiran kepercayaan, nilai-nilai yang dihasilkan, pembagian pengalaman secara individu atau kelompok. Budaya organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bagaimana pandangan karyawan terhadap organisasinya, untuk itu sangat penting suatu organisasi menanamkan nilai-nilai budaya yang sama pada setiap karyawannya. Nilai-nilai ini yang dapat membentuk rasa keyakinan, kebersamaan, kesatuan pada setiap karyawan ataupun kelompok, sehingga dapat memicu terjadinya suasana lingkungan kinerja yang baik dan sehat yang mampu mendorong para karyawan untuk bekerja yang lebih baik dan terwujudnya tujuan organisasi atau perusahaan.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Muhammad Zein (2016)	Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat daerah Kabupaten Siak
2	Aisyah dkk (2014)	Pengaruh Good Governance, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah
3	Denny (2015)	Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Profesionalisme Sumberdaya Manusia Terhadap Kinerja Manajerial	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial
4	Matondang dkk (2015)	Pengaruh Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran, Partisipasi Anggaran, dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utar	Dari penelitian ini, terdapat hasil yang menunjukkan bahwa partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja SKPD

Tabel 2.2
PenelitianTerdahulu
(Lanjutan)

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
5	Primadanadkk (2014)	Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD
6	Wahyuni dkk (2016)	Pengaruh Budaya Organisasi, <i>Locus Of Control</i> , dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah dan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening	Dari penilitian ini memberikan hasil bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah
7	Wirnipin dkk (2015)	Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Organisasi Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja organisasi publik

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu
(Lanjutan)

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
8	Vonny (2014)	Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran, dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial SKPD	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD sedangkan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD
9	Fitri (2016)	Pengaruh Budgetary Goal Characteristics, Kompensasi Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Dengan Motivasi sebagai Variabel Moderasi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat daerah sedangkan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja pegawai

Sumber: data penelitian terdahulu diolah, 2019

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Primadana *et. al* (2014) dalam tulisannya menyebutkan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan keikutsertaan seseorang dalam menyusun dan memutuskan anggaran secara bersama. Berhasil atau gagalnya para staf dalam suatu OPD dalam melaksanakan anggaran adalah merupakan suatu refleksi langsung tentang keberhasilan

ataupun kegagalan manajerial OPD dalam melaksanakan tugas yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Teori steward didasarkan untuk membentuk perilaku anggota organisasi agar selalu dapat diajak kerjasama, meningkatkan kemauan untuk mau berpartisipasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok yang mana hal ini dapat mendorong tercapainya tujuan organisasi.

Pada teori *stewardship* manajemen pemerintahan dituntut untuk memberikan pelayanan bagi kepentingan *principal*. Teori ini menggambarkan perilaku para pengelola anggaran diharapkan dapat bekerja dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat dan instansi yang bertindak sebagai kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, merencanakan dan melaksanakan anggaran yang diamanahkan kepadanya, sehingga perencanaan anggaran dapat tercapai secara maksimal.

Penelitian yang berkaitan dengan partisipasi penyusunan anggaran seperti (Zein, 2016; Denny, 2015; Vonny, 2014; Primadana *et. al*, 2014; Nova *et. al*, 2014) semuanya menunjukkan hasil yang sama yaitu bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berbeda dengan penelitian Fitri (2016) yang menunjukkan hasil bawa partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan paparan diatas, peneliti menduga bahwa memang partisipasi penyusunan anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Adanya partisipasi, para anggota organisasi diharapkan dapat berusaha untuk bertanggung jawab

dengan tugas yang telah diberikan. Semakin tinggi partisipasi antara manajer dan anggota organisasi yang lain, akan semakin meningkatkan kinerja di suatu pemerintah daerah. Dari penjelasan ini, maka dikemukakan hipotesis:

H1: Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

2. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Kenis (1979) dalam Nova (2015) kejelasan sasaran anggaran adalah merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Sasaran anggaran yang jelas dan spesifik ini dapat membantu dan mempermudah seseorang dalam mencapai keberhasilan dari tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Ketidakjelasan suatu sasaran anggaran dapat membuat seseorang menjadi bingung, dan merasa tidak tenang dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga hal ini memicu kegagalan pelaksanaan tugas suatu organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Teori stewardship menjelaskan mengenai situasi manajemen yang tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, melainkan ditujukan pada sasaran hasil utama untuk kepentingan organisasi. Pada pengelolaan anggaran teori steward menggambarkan perilaku para pengelola anggaran diharapkan dapat bekerja dengan sebaik-baiknya agar tercapainya sasaran anggaran yang jelas.

(Zein, 2016; Denny, 2015; Primadana *et. al*, 2014; Nova *et. al*, 2014) dari penelitian mereka yang berkaitan dengan kejelasan sasaran anggaran semua menunjukkan hasil bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berbeda dengan penelitian Vonny(2014) yang memberikan hasil bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menduga bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Semakin tinggi kejelasan sasaran anggaran dapat semakin meningkatkan kinerja pada pemerintah daerah. Dari paparan diatas, dapat dikemukakan hipotesis:

H2: Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

3. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Wirnipin *et. al* (2015) dalam tulisannya bahwa setiap individu yang tergabung dalam suatu organisasi memiliki budaya yang berbeda, disebabkan mereka memiliki latar belakang budaya yang berbeda, namun semua perbedaan itu akan dilebur menjadi satu didalam sebuah budaya yaitu budaya organisasi, untuk menjadi sebuah kelompok yang bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Budaya organisasi merupakan suatu indikator penting dan dominan dalam suatu organisasi. Budaya organisasi menjadi rendah dikarenakan para anggota organisasi baik

secara individu atau kelompok baik atasan maupun bawahan, mereka kurang termotivasi dalam bekerja dan pekerjaan yang bersifat rutinitas yang memicu rendahnya kefokusannya dalam bekerja. Reward, ataupun penghargaan yang lain ini akan menjadikan seseorang termotivasi untuk mengubah sikap atau cara kerjanya menjadi lebih baik. Ketika seorang staf atau karyawan merasa dihargai dalam sebuah organisasi, maka sebuah budaya akan mereka rasakan, dimana hal ini akan membawa dampak ke perubahan perilaku dan cara kerjanya yang mana hal ini meningkatkan kinerja mereka dan tercapainya sebuah tujuan organisasi.

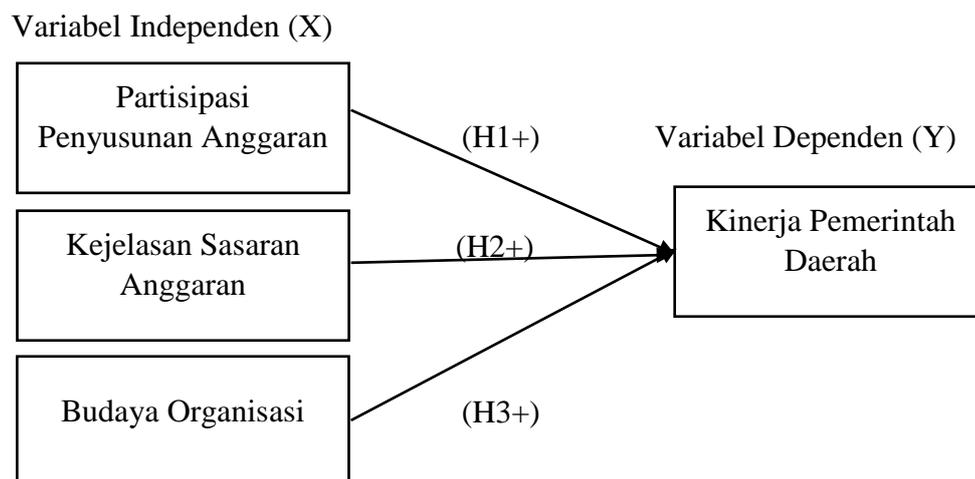
Teori *stewardship* memberikan penjelasan mengenai kepentingan bersama dijadikan dasar dari tindakan seorang manajer. Teori ini menggambarkan kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama kepentingan organisasi bukan hasil kepentingan pribadinya. (Donaldson dan Davis, 1989). Jika terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* dan *steward* maka *steward* akan berusaha bekerjasama untuk bertindak sesuai dengan tindakan *principal* dan demi kepentingan bersama agar tercapainya tujuan bersama.

Penelitian Wirnipin *et. al* (2015) dan Wahyuni *et. al* (2016) yang berkaitan dengan budaya organisasi menunjukkan hasil bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Berbeda dengan hasil penelitian Aisyah *et. al* (2014) yang menunjukkan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Dari penjelasan ini, peneliti menduga bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh

positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Semakin tinggi budaya organisasi dalam suatu organisasi atau satuan kerja, maka semakin memicu perubahan perilaku dan meningkatkan kinerja para anggota organisasi. Dari paparan diatas, dapat dikemukakan:

H3: Budaya Organisasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

D. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat pemerintah daerah Golongan II, Golongan III dan Golongan IV di Kabupaten Purworejo. Sampel dalam penelitian ini yaitu aparat Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kepala Dinas dan Badan, kepala bagian perencanaan, dan kepala sub bagian keuangan di Dinas dan Badan yang berjumlah 20 kantor di Kabupaten Purworejo. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data yang diperoleh dari penyebaran kuisioner langsung kepada Dinas dan Badan yang terdapat di aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif.

B. Definisi Operasional dan Pengukurannya

1. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel terikat. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Kinerja Pemerintah Daerah. Kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijaksanaan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, visi dan misi (Indra, 2006). Mahoney (1963) mendefinisikan kinerja manajerial sebagai kinerja para individu dalam kegiatan-kegiatan manajerial antara lain perencanaan, pelaksanaan, investigasi koordinasi, evaluasi, dan pengawasan. Indikator Kinerja Pemerintah Daerah yang

digunakan dalam penelitian ini dikembangkan oleh Putri (2017) dan Hutapea (2017) yang terdiri dari: perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pemilihan staf, negosiasi, dan perwakilan.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 mendefinisikan kinerja sebagai keluaran atau hasil kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Indikator-indikator tersebut diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin, yaitu (1) “Sangat Tidak Setuju (STS)”, (2) “Tidak Setuju (TS)”, (3) “Netral (N)”, (4) “Setuju (S)”, (5) “Sangat Setuju (SS)”.

2. Variabel Independen

a. Partisipasi Penyusunan Anggaran

Dalam penelitian Agunike (2017) menjelaskan bahwa partisipasi penyusunan anggaran secara lebih luas pada dasarnya merupakan proses organisasional, dimana para anggota organisasi terlibat dan mempunyai kesempatan dalam memberikan pendapat dalam suatu pembuatan keputusan yang berkepentingan dengan organisasi tersebut. Indikator partisipasi penyusunan anggaran yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan oleh Sitepu (2015) dan Putri (2017) yang terdiri dari: keterlibatan semua pihak dalam penyusunan anggaran, kesempatan berpartisipasi, konfirmasi pelaksanaan anggaran, kontribusi, pengaruh, penetapan perencanaan anggaran, dan kesesuaian anggaran. Indikator-indikator tersebut diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin, yaitu (1) “Sangat Tidak Setuju (STS)”, (2)

“Tidak Setuju (TS)”, (3) “Netral (N)”, (4) “Setuju (S)”, (5) “Sangat Setuju (SS)”.

b. Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan organisasi ditetapkan secara jelas dan spesifik, sehingga akan mempermudah pelaksana anggaran dalam mempertanggungjawabkan semua program kegiatan yang telah diimplementasikan (Denny, 2015). Indikator kejelasan sasaran anggaran yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan oleh Sitepu (2015) yang terdiri dari: memahami pekerjaan yang dibebankan, tujuan RKA yang perlu diprioritaskan, tujuan RKA yang jelas, memahami sasaran yang hendak dicapai, tujuan RKA disesuaikan dengan RAPBD, dan kerjasama untuk mencapai sasaran. Indikator-indikator tersebut diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin, yaitu (1) “Sangat Tidak Setuju (STS)”, (2) “Tidak Setuju (TS)”, (3) “Netral (N)”, (4) “Setuju (S)”, (5) “Sangat Setuju (SS)”.

c. Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan sistem nilai bersama dalam suatu organisasi yang menentukan tingkatan bagaimana para anggota organisasi melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi (Sutrisno, 2010:24). Budaya organisasi perlu diterapkan karena dapat mempengaruhi dan mendasari perubahan norma serta perilaku para anggota organisasi, dan memotivasi untuk mendorong kinerja yang lebih baik dan tercapainya tujuan organisasi secara menyeluruh. Indikator budaya organisasi yang digunakan dalam penelitian ini, dikembangkan oleh Widiarko (2017) dan Ginting (2018) yang terdiri dari:

motivasi, agresif dalam bekerja, mempertahankan dan menjaga stabilitas kerja serta inovatif memperhitungkan risiko. Indikator-indikator tersebut diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin, yaitu (1) “Sangat Tidak Setuju (STS)”, (2) “Tidak Setuju (TS)”, (3) “Netral (N)”, (4) “Setuju (S)”, (5) “Sangat Setuju (SS).

3 Analisis Data

a. Statistik Deskriptif

Zein (2016) uji statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data disertai perhitungan guna untuk memperjelas keadaan atau karakteristik data. Dan memberikan gambaran mengenai data yang dilihat melalui *mean*, *varian*, *standar deviasi*, *maksimum*, dan *minimum*, *sum*, *range*, *kurtosis* dan *skewness*. Statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan atau mendeskripsikan data yang menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami (Ghozali, 2011: 19).

b. Uji Validitas Data

Uji validitas data digunakan untuk mengukur suatu data kuisisioner valid atau tidak. Menurut Ghozali (2013:52) suatu kuisisioner dapat dikatakan valid jika pernyataan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut. Hasil penelitian dikatakan valid, apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel (r hitung $>$ r tabel). Alat uji lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat interkorelasi antar variabel yaitu dilakukan analisis faktor dengan KMO MSA (Kaiser Mayer Olkin Measure Of Sampling Adequancy). KMO MSA memiliki nilai yang bervariasi mulai dari 0

sampai dengan 1. Nilai yang harus dikehendaki yaitu $>0,50$ untuk dapat dilakukan analisis faktor (Ghozali,2018).

c. Uji Reliabilitas Data

Menurut Sugiyono (2008,p127) suatu data dapat dikatakan reliabel jika data yang dipakai beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan tetap menghasilkan data yang sama. Dapat dikatakan pula, bahwa suatu data atau jawaban seseorang terhadap pernyataan pada kuesioner yang dihasilkan stabil atau konsisten dari waktu ke waktu maka data atau kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal. Untuk menganalisis reliabilitas biasanya menggunakan koefisien *Cronbach Alpha*, koefisien yang memiliki nilai lebih dari 0,5. Jika hasil penelitian ini menghasilkan *Cronbach Alpha* lebih dari 0,5 ini menunjukkan bahwa data tersebut reliabel (Ghozali,2018).

4. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Berganda

Metode analisis yang digunakan adalah analisis Regresi Linier Berganda, metode ini digunakan untuk meneliti variable-variabel yang berpengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan *pooling data*. Adapun model analisis statistik yang digunakan adalah:

$$KPD = \alpha + \beta_1PPA + \beta_2KSA + \beta_3BO + \epsilon$$

Keterangan:

KPD = Kinerja Pemerintah Daerah

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi

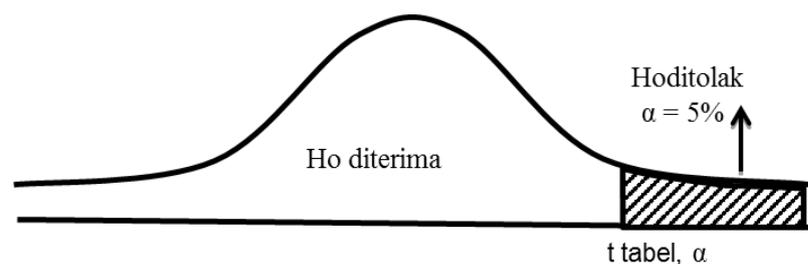
PPA	= Partisipasi Penyusunan Anggaran
KSA	= Kejelasan Sasaran Anggaran
BO	= Budaya Organisasi
ϵ	= error

b. Uji Regresi Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel independen secara individual, seberapa besar tingkat pengaruhnya.

Kriteria yang digunakan dalam uji t yaitu (Ghozali, 2005:85):

- 1) Jika probabilitas signifikansi pada koefisien $< 0,01; 0,05; 0,1$ maka secara individual variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependent, sehingga H_a diterima.
- 2) Sebaliknya, jika probabilitas signifikansi pada $> 0,01; 0,05; 0,1$ maka secara individual, variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependent H_a ditolak.

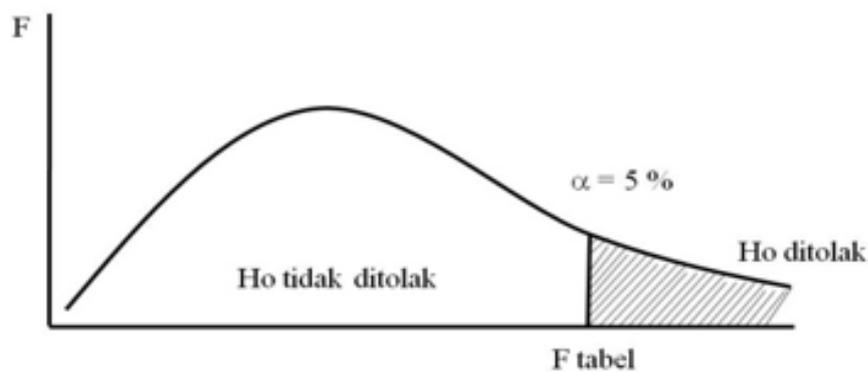


Gambar 3.1
Penerimaan Uji t

c. Uji F (*Good of Fit Test*)

Ghozali (2013:97) Uji F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual. Uji F juga digunakan untuk menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik. Menentukan F tabel menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan pembilang ($= k$ dan derajat kebebasan penyebut $= n-k-1$) dimana k merupakan jumlah variabel bebas. Pengujian ini dilakukan dengan kriteria:

- jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ atau $P \text{ value} < \alpha = 0,05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak, berarti model yang digunakan bagus (fit).
- jika $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ atau $P \text{ value} > \alpha = 0,05$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima, berarti model yang digunakan tidak bagus (tidak fit).



Gambar 3.2
Penerimaan Uji F

d.Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen, seberapa besar presentase pengaruhnya. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Jika nilai R^2 kecil, menunjukkan kemampuan variabel independen terbatas untuk menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai-nilai yang mendekati satu brate variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen (Ghozali, 2011: 97)

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan budaya organisasi terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Purworejo, dengan menggunakan data primer dengan teknik penyebaran kuisisioner ke 20 OPD di Kabupaten Purworejo, dengan total penyebaran kuisisioner 140 responden dan sampel yang dapat diolah 82 responden. Berdasarkan hasil analisis sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan seagai berikut:

Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, yang menunjukkan bahwa adanya partisipasi, para anggota organisasi yang diharapkan dapat berusaha untuk bertanggung jawab dengan tugas yang telah diberikan. Kejelasan sasaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, yang menandakan bahwa para pegawai di OPD Kabupaten Purworejo belum menetapkan anggaran secara jelas, kurang sinkronisasi antara program dan penganggaran, hal ini yang menyebabkan perencanaan dan kejelasan sasaran anggaran tidak tercapai secara maksimal. Terakhir, budaya organisasi berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Artinya, di OPD Kota Purworejo tidak terdapat rasa kepedulian pegawai dan rasa loyal pegawai dan pemimpin terhadap instansi, Selain itu Persamaan

persepsi antara keinginan pegawai dengan pemimpin yang menjadikan para pegawai termotivasi untuk menjalankan segala tugas yang diberikan dengan baik. Sehingga tercapainya kualitas laporan keuangan yang lebih baik dan berkualitas.

B. Keterbatasan

1. Objek penyebaran kuesioner masih terbatas, dapat lebih dari 20 OPD, untuk bisa mendapatkan sampel yang lebih banyak lagi
2. Objek penyebaran kuesioner terbatas, tidak hanya di OPD tapi dapat dilakukan di SKPKPD (biro keuangan, dll)
3. Keterbatasan variabel penelitian yang digunakan oleh peneliti
4. Keterbatasan waktu, peneliti tidak menerapkan metode wawancara

C. Saran

1. Objek penyebaran kuisisioner dapat lebih banyak lagi, terdapat 42 OPD di kabupaten purworejo, peneliti masih mampu jika memperluas objek semisal 80% dari total OPD. Dan juga dapat dilakukan di SKPKPD agar mendapat hasil yang lebih jelas dan kuat.
2. Peneliti yang selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel penelitian agar menghasilkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang cukup besar atau yang dapat mengungkapkan masih ada faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi kinerja pemerintah daerah seperti akuntabilitas publik, komitmen organisasi, dan masih banyak lagi.

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memahami iklim organisasi
4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memahami dan memastikan responden (responden yang merupakan bagian penting atau ikut serta dalam penganggaran).
5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan metode lain untuk mendapatkan data yang lengkap. Seperti penyebaran kuisisioner dan langsung gunakan metode wawancara secara langsung agar lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aginta, V. M. (2018). *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran , Budaya Organisasi dan Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial (Studi Kasus pada Bank BTN Kantor Cabang Bandar Lampung)*.
- Aisyah, Siti, Karmizi, E. S. (2014). Pengaruh Good Governance, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Ekonomi*.
- Asrini. (2017). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja SKDP di Pemerintah Daerah Kota Palu. In *e Jurnal Katalogis*.
- Bastian, I. (2006a). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, I. (2006b). *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: salemba empat.
- Bhakti, D. C. (2015). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Manajerial. *Assets*, 5.
- Brewer, Peter C; Noreen, W. E. R. H. G. (2013). Akuntansi Manajerial. In *Akuntansi Manajerial*. Jakarta: Salemba Empat.
- Chong, V. K., & Chong, K. M. (2008). Budget Goal Commitment and Informational Effects of Budget Participation on Performance: A Structural Equation Modeling Approach. *Behavioral Research in Accounting*. <https://doi.org/10.2308/bria.2002.14.1.65>
- Donaldson, D. J. H. & L. (1989). CEO Governance and Shareholder returns: Agency theory or Stewardship theory. *Paper Presented at the Annual Meeting of the Academy of Management, Washington, DC*.
- E Suhartono & Solichin M. (n.d.). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Senjangan Anggaran Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*, 23–26.
- Fauziah, S. (2016). Analisis Pagaruh Prinsip-prinsip Good Corporate Governance, Motivasi, dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintahan (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*. h: 1-8..
- Fitri, T. R. (2016). “Pengaruh Budgetary Goal Characteristics, Kompensasi Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Dengan Motivasi sebagai

Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Dinas-dinas Kabupaten Rokan Hilir).” *JOM FEKON*, Vol. 3 No.

- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program INM SPSS.21 Umlpdate PLS Regresi* (edisi 7). BP Universitas Diponegoro.
- Ginting, H. S. (2009). Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Perangkat Daerah Di Pemerintahan Kabupaten Karo. *Tesis Pascasarjana Universitas Sumatra Utara, Medan*.
- Kenis, I. (1979). “Effects of Budgetary Goal Characteristic on Manajerial Attitudes and Performance.” *The Accounting Review*. 54(4), Pp. 707-721.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016
- L, S. (2015). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik dan Pengendalian Akuntansi terhadap Kinerja Manajerial di Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatra Utara. Universitas Sumatra Utara 2015. *Univ Sumatra Selatan*, 51–74.
- Luthans, F. (1998). *Organizational Behavior. Eight Edision, Mc. Growth-Hill Book co Cliffs*. (Eight Edis). New Jersey: Prentice Hall.
- Mahoney, Thomas A, Thomas H. Jerdee, and S. J. C. (1963). “*Develpment Of Managerial Performance a Research Approach*..” Southwetern Publishing.
- Mbon, F. E. (2014). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 112–120.
- Mulyadi. (2001). *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Murray, J. D., Maini, P. K., & Tranquillo, R. T. (1988). Mechanochemical models for generating biological pattern and form in development. *Physics Reports*. [https://doi.org/10.1016/0370-1573\(88\)90003-8](https://doi.org/10.1016/0370-1573(88)90003-8)
- Nova I Dea Matondang, Hasan Basri, M. A. (2015). Pengaruh Sinkronisasi Perencanaan Dan Penganggaran Terhadap Kinerja Skpd. *Magister Akuntansi*, 4(4), 36–45. <https://doi.org/10.2514/1.40133>
- Poerwati, T. (2002). Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial: Budaya Organisasi dan Motivasi Sebagai Variabel Moderating. *Simposium Nasional Akuntansi V Semarang 5-6 September*.
- Primadana, gede herry merta, Yuniarta, gede adi, & Adiputra, made pradana. (2014). pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD dengan pengawasan internal sebagai variabel pemoderasi (studi empiris pada pemerintah kabupaten badung). *Jurnal Akuntansi Program S1*.

purworejokab.go.id/web/pertanggung-jawaban.html

Sartika. (2013). Program studi akuntansi fakultas ekonomi universitas negeri padang 2013. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*, 4(2), 1–32.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Vonny, N. A. (2013). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Sijunjung). *Jurnal Akuntansi 2.3* (2014). *Terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Sijunjung)*. *Jurnal Akuntansi 2.3* (2014).

Wahyuni, E. S., Taufik, T., & Ratnawati, V. (2017). Pengaruh Budaya Organisasi, Locus Of Control, Stres Kerja Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah dan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Manajemen*, 20(2), 189. <https://doi.org/10.24912/jm.v20i2.43>

Wirnipin, S. K., Adiputra, I. M. P., & Yuniarta, G. A. (2015). Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Organisasi Publik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1), 1–12.

Zein, M. (2016). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Siak). *Jurnal JOM FEKON Fakultas Ekonomi Universitas Riau.*, Vol. 3 No.

<https://metrotimes.news/breaking-news/purworejo-kejar-sakip-predikat-a-opd-diminta-tindak-lanjuti-evaluasi-menpan/>

<https://radarjogja.jawapos.com/2019/04/27/opd-diminta-kerja-keras-kejar-predikat-a/>

[http://www.bpkp.go.id/berita/read/21671/5/Kabupaten-Purworejo-Pertama-](http://www.bpkp.go.id/berita/read/21671/5/Kabupaten-Purworejo-Pertama-Implementasikan-SIMDA-SAKIP.bpkp)

[Implementasikan-SIMDA-SAKIP.bpkp](http://www.bpkp.go.id/berita/read/21671/5/Kabupaten-Purworejo-Pertama-Implementasikan-SIMDA-SAKIP.bpkp)